

## **PRAKTIK TRANSPARANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI MI AL IZUDINIYAH CIPULUS PURWAKARTA**

**M Jarkasih<sup>1</sup>, Gina Awaliyah<sup>2</sup>, Moh Sugandi<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup>STAI Al Badar Cipulus Purwakarta, Indonesia

Corresponden E-Mail; <sup>1</sup>[jarkasih1606@gmail.com](mailto:jarkasih1606@gmail.com)

### **Abstrak**

Transparansi pengelolaan keuangan merupakan aspek penting bagi madrasah yang bergantung pada partisipasi masyarakat dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi transparansi dalam pengelolaan keuangan di MI Al Izudiniyah melalui keterbukaan dokumen, partisipasi pemangku kepentingan, pola pelaporan, serta mekanisme pengawasan internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa madrasah menerapkan transparansi dokumentatif melalui penyediaan RKAM dan bukti pertanggungjawaban, serta transparansi partisipatif melalui musyawarah yang melibatkan guru, komite, dan yayasan. Pelaporan dilakukan secara praktis melalui komunikasi langsung yang dinilai efektif dalam konteks madrasah kecil. Kendala utama muncul dari keterbatasan petunjuk teknis yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah, sehingga menuntut penyesuaian administratif dalam pelaksanaannya. Meski demikian, pengawasan internal berjalan baik melalui pemeriksaan SPJ, penggunaan sistem digital, serta prosedur pencairan yang berlapis. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan di MI Al Izudiniyah telah mencerminkan prinsip tata kelola yang baik, dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang memadai sesuai karakteristik lembaga pendidikan berbasis Masyarakat.

**Kata Kunci:** Transparansi Keuangan; Akuntabilitas; Madrasah; Pengelolaan Dana Pendidikan

### **Abstract**

Transparency in financial management is a key aspect for madrasahs that rely on community participation and public trust. This study aims to describe the implementation of transparency in financial management at MI Al Izudiniyah through document disclosure, stakeholder participation, reporting patterns, and internal supervision mechanisms. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews, non-participant observation, and document analysis. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the madrasah implements documentary transparency through the provision of RKAM and accountability evidence, as well as participatory transparency through deliberative meetings involving teachers, the school committee, and the foundation. Financial reporting is carried out through direct communication, which is considered effective in the context of a small madrasah. The main challenge arises from technical guidelines that do not always align with the school's operational needs, requiring administrative adjustments in their implementation. Nevertheless, internal supervision functions effectively through SPJ verification, the use of digital systems, and layered fund disbursement procedures. Financial management at MI Al Izudiniyah reflects good governance principles, with transparency and accountability in accordance with the characteristics of a community-based educational institution

**Keywords:** *Financial Transparency, Accountability, Madrasah, Educational Finance Management.*

## 1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan pada institusi pendidikan dasar termasuk madrasah ibtidaiyah memiliki peran sentral dalam memastikan kelangsungan layanan pendidikan yang berkualitas. Dalam kerangka tata kelola modern, lembaga pendidikan diharapkan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan pengendalian internal, sebagaimana dianjurkan dalam literatur tata kelola publik dan manajemen keuangan. Seiring dengan meningkatnya perhatian publik terhadap pemanfaatan anggaran pendidikan khususnya dana dari pemerintah seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka kemampuan lembaga untuk mengelola dana secara terbuka dan bertanggung jawab menjadi indikator krusial dari kualitas pengelolaan institusi.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya penggunaan anggaran dari sumber sumber biaya yang ada pada pelaksanaan pendidikan atau dalam proses belajar mengajar dikelas, seperti perencanaan anggaran pendidikan, pembiayaan pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, pertanggungjawaban keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan, yang semua ini terdapat dalam manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan berpengaruh terhadap produktivitas suatu organisasi. Manajemen merupakan komponen utama dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. (Sugandi & Azizah, 2023).

Prinsip transparansi mengacu pada keterbukaan lembaga dalam menyediakan informasi anggaran yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Dalam konteks pendidikan, transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi rencana anggaran, laporan realisasi, serta penyampaian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua, komite sekolah, dan masyarakat. Literatur menunjukkan bahwa transparansi seperti ini mendukung peningkatan kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan dana. Misalnya, penelitian pada sekolah dan madrasah menunjukkan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan keuangan berkontribusi pada meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas layanan Pendidikan (Adzkie et al., 2024)

Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan. Akuntabilitas mengandung kewajiban bagi organisasi untuk mempertanggungjawabkan keputusan, proses, dan hasil kepada pihak-pihak berkepentingan. Dalam praktiknya di tingkat sekolah dasar maupun madrasah akuntabilitas meliputi penyusunan laporan pertanggungjawaban, dokumentasi transaksi secara sistematis, serta kepatuhan terhadap regulasi penggunaan dana pendidikan. Penelitian pada pengelolaan dana BOS di sekolah

menengah menunjukkan bahwa akuntabilitas yang baik berkorelasi positif dengan efektivitas penggunaan dana (Dinataa et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan manajemen keuangan sekolah/madrasah sangat bergantung pada komitmen terhadap akuntabilitas.

Kualitas pengelolaan keuangan juga sangat ditentukan oleh efektivitas perencanaan dan implementasi anggaran. Efektivitas dalam konteks ini berarti sejauh mana pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan nyata dan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan layanan pendidikan. Studi-studi menunjukkan bahwa efektivitas anggaran tercapai apabila perencanaan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan riil dan melibatkan pemangku kepentingan internal dalam proses penyusunan anggaran (Laksono et al., 2025). Namun, di madrasah dan sekolah dasar, efektivitas sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya kompetensi pengelola, serta variasi kebutuhan operasional harian sehingga dibutuhkan praktik manajemen yang lebih sistematis dan terukur.

Pengendalian internal menjadi faktor pendukung penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas secara konsisten. Kerangka kerja pengendalian internal (*internal control*) meliputi elemen seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi, serta pemantauan dapat memperkuat keandalan laporan keuangan dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Meskipun sebagian besar literatur yang ada lebih banyak meneliti di tingkat sekolah umum atau pendidikan tinggi, prinsip pengendalian internal terbukti relevan dan penting untuk diterapkan di lembaga pendidikan mana pun agar manajemen dana berjalan baik dan akuntabel (Ernawati & Faisol, 2020).

Banyak lembaga pendidikan termasuk madrasah mulai mengeksplorasi penerapan sistem informasi manajemen keuangan berbasis digital. Digitalisasi ini memungkinkan dokumentasi lebih rapi, akses data lebih cepat, serta integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Studi pada madrasah menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis daring dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana secara signifikan (NUR & HANIF, 2024). Namun keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia serta ketersediaan infrastruktur dan pemahaman regulasi pendanaan.

Walaupun prinsip transparansi dan akuntabilitas banyak dianjurkan secara regulatif maupun teoretis, pelaksanaannya di lapangan menunjukkan variasi yang cukup besar. Terdapat madrasah yang telah berhasil menerapkan manajemen keuangan dengan baik, tetapi ada juga yang masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya dokumentasi transaksi, keterbatasan

keterlibatan pemangku kepentingan, atau keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang menuntut penelitian empiris kontekstual lebih lanjut untuk memahami praktik nyata serta tantangan dan strategi perbaikan yang realistis sesuai kondisi masing-masing lembaga.

Dalam hal ini apabila strategi komunikasi dijalankan dengan baik maka pembiayaan pendidikan akan berjalan sangat efektif karena keikutsertaan pihak eksternal dalam memperkenalkan madrasah tersebut kepada masyarakat luar. Pengelolaan pembiayaan dalam pendidikan yang kuat sangatlah penting, terutama dalam era digital saat ini. Manajemen pembiayaan pendidikan dan brand yang kuat dapat membantu meningkatkan citra lembaga pendidikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang efektif bagi lembaga pendidikan sangat diperlukan” (Sariwati et al., 2024).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan di MI Al Izudiniyah termasuk bentuk penerapannya, tantangan yang dihadapi, serta faktor pendukung. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan tata kelola keuangan madrasah serta menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dan komunitas madrasah dalam merumuskan perbaikan kebijakan di tingkat praktis. Penelitian ini sekaligus memperkuat literatur mengenai manajemen keuangan pendidikan berbasis prinsip good governance, khususnya dalam konteks pendidikan dasar Islam

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pengelolaan keuangan dalam konteks nyata tanpa adanya manipulasi terhadap variabel penelitian. Desain ini memungkinkan peneliti menggambarkan secara komprehensif bagaimana prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta pengendalian internal dijalankan dalam lingkungan madrasah. Pendekatan kualitatif dianggap paling tepat untuk mengkaji praktik manajerial berbasis perilaku dan interaksi sosial, sebagaimana direkomendasikan dalam metodologi penelitian kontemporer (Creswell, 2015).

Lokasi penelitian ditetapkan di MI Al Izudiniyah melalui teknik purposive, dengan pertimbangan bahwa madrasah tersebut aktif mengelola dana pemerintah maupun nonpemerintah dan secara rutin menyusun laporan pertanggungjawaban. Informan penelitian juga ditentukan

menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan keuangan madrasah. Informan utama mencakup kepala madrasah, bendahara, operator EMIS/keuangan, guru senior, dan komite madrasah. Apabila diperlukan informasi tambahan, peneliti menggunakan snowball sampling untuk memperluas sumber data secara bertahap (Sugiyono, 2020).

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali praktik perencanaan anggaran, realisasi pembiayaan, transparansi, serta mekanisme pelaporan. Observasi dilakukan untuk memahami proses manajerial secara langsung, seperti penyusunan SPJ, pengadaan barang, atau rapat anggaran. Sementara itu, dokumentasi dianalisis melalui telaah terhadap RKAM, laporan realisasi anggaran, BKU, bukti transaksi, dan LPJ.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument*, yang berperan dalam mengumpulkan, menafsirkan, dan memvalidasi data. Instrumen bantu berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan format dokumentasi disusun berdasarkan indikator tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan pengendalian internal, serta regulasi pengelolaan dana pendidikan pada madrasah (Moleong & Surjaman, 2014).

Validitas dan keabsahan data dijamin melalui penggunaan teknik triangulasi, meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan mencocokkan informasi dari berbagai pihak seperti kepala madrasah, bendahara, guru, serta komite. Triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan antara data wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengulang konfirmasi data pada waktu yang berbeda. Selain itu, proses validasi diperkuat melalui *member checking*, diskusi dengan rekan sejawat, dan penyusunan *audit trail* untuk menjaga transparansi proses penelitian (Patton, 2015).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif (Miles et al., 2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti mengorganisasi, menyaring, dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian. Tahap penyajian data dituangkan dalam bentuk narasi deskriptif yang menunjukkan keterkaitan antara temuan empiris dengan prinsip good governance. Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan hubungan yang muncul selama proses analisis, sehingga diperoleh gambaran holistik

mengenai praktik transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan pengendalian internal di MI Al Izudiniyah.

Dengan rancangan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai praktik manajemen keuangan madrasah yang selaras dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, temuan penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur dan memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan pengelolaan keuangan pada lembaga pendidikan dasar Islam.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Transparansi merupakan prinsip penting yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh akses atas informasi suatu organisasi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Prinsip ini menuntut organisasi untuk menyajikan data secara terbuka, jujur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks organisasi nonlaba, transparansi menjadi sangat krusial karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik atau dana umat dikelola secara rinci oleh pihak pengelola (Mardiasmo, 2021).

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola organisasi modern, termasuk lembaga pendidikan. Transparansi dipahami sebagai keterbukaan organisasi dalam menyediakan informasi yang akurat, jujur, dan mudah diakses oleh publik mengenai proses pengelolaan sumber daya, khususnya keuangan. Menurut (Matasick, 2017), transparansi menjadi elemen inti *good governance* karena berfungsi mencegah penyimpangan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa pengambilan keputusan berjalan secara akuntabel. Dalam konteks organisasi nonlaba, termasuk sekolah dan madrasah, transparansi menjadi lebih krusial karena pembiayaan pendidikan sebagian besar berasal dari dana publik dan masyarakat.

Secara normatif, keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap institusi yang mengelola dana publik untuk menyediakan akses informasi secara tepat dan proporsional. Pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, prinsip transparansi ini diperkuat melalui berbagai regulasi teknis mengenai pengelolaan dana BOS dan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). Sejalan dengan (Rohman et al., 2024) menunjukkan bahwa transparansi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan stakeholder dan efektivitas pengendalian internal.

Dengan dasar diatas, bagian ini membahas secara sistematis bagaimana transparansi keuangan diwujudkan di MI Al Izudiniyah melalui mekanisme dokumentatif, partisipatif, dan pengawasan internal. Pembahasan juga mengaitkan temuan empiris dengan teori serta hasil penelitian terdahulu, sehingga analisis yang disajikan bersifat komprehensif dan berkesinambungan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa MI Al Izudiniyah telah menerapkan transparansi melalui dua mekanisme utama, yaitu transparansi dokumentatif dan transparansi partisipatif. Pertama, transparansi dokumentatif dilakukan dengan memberikan akses terhadap dokumen perencanaan dan penggunaan anggaran, terutama Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). Dokumen ini disampaikan kepada guru, komite, dan yayasan agar seluruh pihak memahami alur perencanaan, alokasi, serta prioritas pembiayaan sekolah. Temuan ini selaras dengan pendapat (Mardiasmo, 2021) bahwa transparansi dalam organisasi nonlaba menuntut adanya penyediaan dokumen yang sistematis dan dapat diverifikasi oleh stakeholder.

Kedua, transparansi diwujudkan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Forum musyawarah digunakan untuk menyampaikan rencana anggaran, membahas kebutuhan prioritas, dan menerima masukan terkait pengelolaan dana. Musyawarah tersebut mencerminkan praktik *good governance* berbasis partisipasi, yaitu keterlibatan aktif stakeholder dalam proses pengambilan keputusan (Darmawan, 2019). Dalam konteks lembaga pendidikan, model ini dipandang efektif karena memungkinkan akuntabilitas berjalan dari bawah ke atas (*bottom-up accountability*).

Tabel 1. Bentuk Pelaksanaan Transparansi Dokumentatif di MI Al Izudiniyah

<b>Bentuk Transparansi</b>	<b>Praktik di Lapangan</b>	<b>Bukti Temuan</b>
Dokumentatif	Penyampaian RKAM kepada pihak internal	Wawancara & dokumen RKAM
Partisipatif	Musyawarah dengan guru, orang tua, dan yayasan	Notulen & penjelasan informan
Praktis/Informal	Penjelasan keuangan saat pembagian honor	Penuturan guru & kepala sekolah

Berdasarkan tabel diatas, transparansi tidak hanya berbentuk dokumen formal, namun juga disampaikan secara langsung dalam interaksi sehari-hari, terutama saat pemberian honor. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah mengutamakan pemahaman stakeholder, meskipun belum menyusun laporan tertulis berkala.

Secara teoretis, temuan ini mendukung gagasan Bovaird & Löffler : (Indahsari & Raharja, n.d.) yang menyebut bahwa transparansi tidak hanya berbentuk publikasi dokumen, tetapi juga proses deliberatif yang melibatkan stakeholder dalam diskusi mengenai prioritas pendanaan. Dengan demikian, praktik transparansi di MI Al Izudiniyah menunjukkan adanya keseimbangan antara keterbukaan formal dan partisipasi sosial.

Temuan ini sejalan dengan teori *open government* yang menempatkan aksesibilitas informasi dan partisipasi publik sebagai dua pilar utama transparansi (Asnawi, 2016). Studi lain menunjukkan bahwa keterlibatan komite, guru, dan yayasan dalam musyawarah anggaran meningkatkan legitimasi keputusan keuangan serta mengurangi potensi konflik internal (Fadhilah et al., 2025). Penelitian terbaru oleh juga menegaskan bahwa madrasah dengan mekanisme deliberatif cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dibandingkan lembaga yang hanya mengandalkan keterbukaan dokumen. Dengan demikian, implementasi transparansi di MI Al Izudiniyah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial-partisipatif sebagaimana direkomendasikan literatur *governance* pendidikan kontemporer.

MI Al Izudiniyah tidak menyusun laporan tertulis secara berkala seperti triwulan atau semesteran, akan tetapi menerapkan laporan periodik melalui komunikasi langsung pada momen tertentu. Pelaporan kepada guru dilakukan bersamaan dengan pemberian honor, ketika pihak sekolah menjelaskan jumlah dana yang diterima serta penggunaannya. Pelaporan kepada orang tua dan yayasan dilakukan melalui forum musyawarah.

Pola pelaporan seperti ini dikategorikan sebagai *practical transparency*, yaitu model transparansi yang tidak bergantung sepenuhnya pada dokumen formal, tetapi pada komunikasi langsung yang relevan dengan konteks kegiatan. Menurut (Talia, 2021), dalam banyak organisasi nonlaba kecil, transparansi informal seperti ini sering kali lebih efektif dalam membangun kepercayaan publik dibandingkan pelaporan formal yang kaku. Temuan ini berbeda dengan laporan biasanya tetapi tidak bertentangan dengan kebijakan formal pemerintah. Keterbatasan sumber daya, minimnya staf administrasi, dan skala madrasah yang kecil membuat pelaporan lisan lebih realistis untuk diterapkan.

Meskipun demikian, esensi transparansi tetap terjaga karena informasi keuangan tetap disampaikan secara terbuka kepada pihak yang berhak mengetahuinya. Model transparansi praktis yang diterapkan MI Al Izudiniyah menguatkan temuan (Setiawan & Shaleh, 2023), bahwa lembaga kecil sering mengandalkan komunikasi langsung sebagai media pelaporan karena keterbatasan sumber daya administratif. Kendala utama yang ditemukan adalah adanya kegiatan sekolah yang tidak tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Kemenag sehingga tidak dapat

dibiayai langsung oleh anggaran resmi. Kebutuhan operasional yang tidak terakomodasi dalam juknis mengharuskan sekolah mencari sumber dana alternatif atau melakukan penyesuaian administratif.

Kondisi ini menyebabkan pelaporan menjadi lebih rumit karena penggunaan dana harus tetap mengikuti ketentuan juknis meskipun kebutuhan lapangan bersifat lebih dinamis. Fenomena tersebut banyak ditemukan pada madrasah kecil (Adekamisti et al., 2025). Batasan juknis yang rigid membuat fleksibilitas penganggaran menjadi terbatas, sehingga sekolah dituntut menyeimbangkan antara kepatuhan regulatif dan kebutuhan operasional nyata. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2021) yang menegaskan bahwa akuntabilitas dalam organisasi publik kerap dihadapkan pada dilema antara kepatuhan prosedural dan tuntutan kontekstual di lapangan. Kondisi tersebut berdampak pada tingkat transparansi, karena informasi yang disampaikan kepada stakeholder harus disesuaikan dengan batasan regulatif, sementara beberapa kebutuhan aktual tidak dapat dituangkan secara formal dalam dokumen resmi. Meskipun demikian, madrasah tetap berupaya menjaga keterbukaan melalui penjelasan lisan agar seluruh pihak memahami dinamika yang terjadi.

Dalam praktiknya, MI Al Izudiniyah menerapkan mekanisme pengawasan yang relatif ketat melalui pemeriksaan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada setiap rapat evaluasi. Pemeriksaan SPJ dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara offline melalui dokumen fisik dan secara online melalui sistem digital Kementerian Agama. Penerapan dua mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya adaptasi madrasah terhadap digitalisasi administrasi pendidikan, sejalan dengan kebijakan Kemenag melalui implementasi aplikasi E-RKAM sebagai instrumen penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan madrasah.

Temuan ini mendukung konsep *internal control framework* (COSO, 2013) yang menekankan pentingnya verifikasi berlapis dalam mencegah penyimpangan dana publik. Studi oleh (Wedhayanti & Akie Rusaktiva Rustam, SE., MSA., n.d.) menunjukkan bahwa kombinasi antara bukti fisik dan sistem digital meningkatkan akurasi audit dan meminimalkan risiko manipulasi data. Penelitian nasional oleh (Abdillah & Aisyah, 2022) juga menegaskan bahwa digitalisasi melalui aplikasi Kemenag seperti E-RKAM terbukti meningkatkan konsistensi pencatatan dan memperkuat integritas laporan SPJ. Dengan demikian, mekanisme pengawasan yang diterapkan MI Al Izudiniyah telah berada dalam tren modernisasi tata kelola keuangan sektor pendidikan

Proses pencairan dana BOS mengikuti prosedur berlapis, mulai dari perencanaan, rencana belanja, pengajuan, verifikasi, hingga realisasi pembelian. Struktur pengawasan ini sesuai dengan konsep internal control dalam sektor publik, yaitu memastikan bahwa setiap pengeluaran telah disetujui, diverifikasi, dan didukung bukti sah (Mardiasmo, 2021). Dengan demikian, transparansi tidak hanya tampak dari penyampaian informasi kepada stakeholder, tetapi juga dari kepatuhan administratif terhadap mekanisme audit internal pemerintah. Temuan ini menguatkan teori Bovaird & Löffler:Matasick, 2017) bahwa kontrol internal merupakan aspek inti dari *good governance* yang melengkapi keterbukaan informasi publik.

Proses penyusunan laporan keuangan dimulai dari kepala sekolah yang menghimpun masukan guru dan waka sarpras mengenai kebutuhan program. Masukan ini kemudian diformalkan dalam RKAM dan diverifikasi oleh bendahara. Model kolaboratif ini selaras dengan gagasan (Iman et al., 2024) yang menekankan bahwa perencanaan pendidikan yang efektif harus melibatkan semua unsur sekolah secara partisipatif. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun madrasah telah mengikuti ketentuan Juknis Kemenag, yang meliputi: 1) RKAM 2) RPS 3) Nota belanja 4) Dokumentasi kegiatan 5) Bukti honor 6) Bukti transaksi lainnya.

Kelengkapan dokumen tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip akuntabilitas administratif sebagaimana dijelaskan Arikunto (2019), bahwa setiap laporan keuangan harus dilengkapi bukti sah sebagai dasar verifikasi. Pelaporan dilakukan melalui kombinasi metode manual dan digital. Digitalisasi membantu efisiensi pelaporan, sedangkan arsip manual berfungsi sebagai bukti audit fisik. Model ganda ini sesuai dengan rekomendasi (Kieso et al., 2019) mengenai pentingnya konsistensi dokumentasi dalam pelaporan keuangan organisasi pendidikan. Secara keseluruhan, mekanisme pelaporan di MI Al Izudiniyah menunjukkan adanya tata kelola yang cukup tertib meskipun dilakukan dengan sumber daya terbatas. Keterpaduan antara kolaborasi internal, kepatuhan juknis, serta kelengkapan bukti transaksi memperkuat tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga.

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan di MI Al Izudiniyah telah diimplementasikan melalui keterbukaan dokumen, pelibatan aktif pemangku kepentingan dalam musyawarah, serta sistem pelaporan yang bersifat praktis namun tetap akuntabel. Transparansi dokumentatif melalui penyediaan RKAM dan bukti pertanggungjawaban memperkuat aksesibilitas informasi bagi guru, komite, dan yayasan,

sementara transparansi partisipatif melalui forum musyawarah memastikan proses pengambilan keputusan berjalan secara deliberatif dan responsif terhadap kebutuhan sekolah. Pola pelaporan yang dilakukan secara lisan pada momen tertentu menunjukkan adaptasi kontekstual lembaga kecil dalam menjaga kepercayaan publik meskipun tidak menyusun laporan formal berkala. Kendala yang muncul terutama berkaitan dengan keterbatasan juknis yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan operasional sekolah, sehingga menuntut fleksibilitas administratif dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Di sisi lain, mekanisme pengawasan melalui pemeriksaan SPJ, penggunaan sistem digital Kemenag, serta prosedur pencairan berlapis menunjukkan bahwa unsur pengendalian internal telah berjalan secara memadai. Proses penyusunan laporan yang kolaboratif, kelengkapan bukti transaksi, serta kepatuhan terhadap regulasi menegaskan bahwa madrasah telah menerapkan prinsip *good governance* meskipun dengan sumber daya terbatas. Dengan demikian, praktik transparansi di MI Al Izudiniyah dapat dinilai efektif dan konsisten dengan regulasi pemerintah serta teori tata kelola organisasi pendidikan, sekaligus menjadi model adaptif bagi lembaga sejenis dalam mengelola keuangan secara terbuka dan akuntabel.

### **Ucapan Terimakasih**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- a. MI Al Izudiniyah, selaku lembaga yang telah memberikan izin penelitian, dukungan data, serta fasilitas selama proses pengumpulan informasi.
- b. Bapak Moh. Sugandi, S.Sos., M.Pd., selaku dosen Mata Kuliah Pembiayaan Pendidikan, atas arahan akademik, koreksi substantif, serta bimbingan metodologis yang sangat berarti dalam penyusunan penelitian ini.
- c. Wini Wafiroh, S.Pd. atas dukungan moral dan nasihat praktis yang membantu peneliti dalam proses penulisan manuskrip.

Seluruh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat berarti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

### **Daftar Pustaka**

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdillah, M. Y., & Aisyah, S. (2022). *Kehadiran Aplikasi Digital Pada Proses Pelaporan Dana*

- Bos Madrasah Aliyah: Apa Saja Kendala Dalam Implementasinya*. 2(November 2022), 754–762.
- Adekamisti, R., Syamsir, Hamengkubuwono, & Istan, M. (2025). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Studi Kasus di Daerah Terpencil*. 9(1), 73–87.
- Adzkia, R., Anastasya, F., Awalliyah, N. S., & Kusumaningrum, H. (2024). *Manajemen keuangan sekolah: transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana*. 2(3), 278–289.
- Asnawi. (2016). *Paradigma Transparansi Dalam Good Governance*. 1(1), 57–67.
- COSO. (2013). *Internal Control—Integrated Framework*.
- Creswell, J. W. (2015). *Educational Research*.
- Darmawan. (2019). *Accountability and Transparency: Application of Good Educational Governance*. 1(1), 1–14.
- Dinataa, H. S., Putrib, A. M., & Aristi, M. D. (2023). *Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan*.
- Ernawati, & Faisol, I. A. (2020). *Internal Control Effectiveness of Financial Management In Private Higher Education*. 8(1), 36–43.
- Fadhilah, Abiyu, F., Ariesta, A., & Alfaruqi, D. M. (2025). *Manajemen Keuangan Sekolah yang Transparan dan Akuntabel*. 02(01), 419–424.
- Iman, M., Erlina, I. A. H., Sole, Y. Y. E., Wagimin, Mujahid, T., Siadari, U. B., Syaf, Z. Z., Naldi, A., Liyong, Y., & Handoko. (2024). *Manajemen Pendidikan Teori dan Praktik dalam sistem pendidikan*.
- Indahsari, C. L., & Raharja, J. (n.d.). *New Public Management ( NPM ) as an Effort in Governance*.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D., Wiecek, I. M., & McConomy, B. J. (2019). *Intermediate Accounting, Volume 2*. John wiley & sons. [https://books.google.co.id/books?id=\\_tmMkC5DNuAC&lpg=PR4&pg=PR4#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=_tmMkC5DNuAC&lpg=PR4&pg=PR4#v=onepage&q&f=false)
- Laksono, A., Ayu, S. M., Sari, P. P., & Achmadin, Z. (2025). *Optimizing Financial Management : A Priority In Improving Efficiency And Transparency In High School*. 04(02), 176–189.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
- Matasick, C. (2017). Open government: How transparency and inclusiveness can reshape public trust. *Trust and Public Policy*, 105.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook. (No Title)*.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- NUR, A. F., & Hanif, M. (2024). *Digitalisasi Untuk Transparansi Keuangan Sekolah Di Mts Ma'arif Nu 1 Sumbang*. 4(2), 67–74.

- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice.* (No Title). <https://books.google.co.id/books?id=-CM9BQAAQBAJ&lpg=PA1&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q&f=false>
- Rohman, A., Nurkhin, A., & Mukhibad, H. (2024). *Transparency and Accountability of School Funds : The Implications for Efficiency and Effectiveness of School Activities.* 10(September), 118–128.
- Sariwati, N., Supiana, Zaqiah, Q. Y., & Jamil, Z. L. (2024). *Manajemen pembiayaan pendidikan dan strategi branding di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Djati Bandung.* Burangrang: Jurnal Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat, 3(1), 69–80.
- Setiawan, B., & Shaleh. (2023). *Akuntabilitas Sebagai Prinsip Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan.* 2(3), 171–176. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1765>
- Sugandi, M., & Azizah, Z. Z. N. (2023). *Manajemen pembiayaan pendidikan pondok pesantren (Penelitian pembiayaan pada Pondok Pesantren Al-Huda di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat).* Dalam Annual Islamic Education Management Conference (AIMC) (hlm. 586–603).
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.*
- Talia, R. (2021). *analisis penerapan akuntansi pada smp yayasan pendidikan perkappen tandun group kasikan.*
- Wedhayanti, A. R., & Akie Rusaktiva Rustam, SE., MSA., A. (n.d.). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pada Organisasi AIESEC Indonesia).*
- Yunita, R., & Putu, Luh Perdanawati, V. I. (2020). *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada.* 6(2), 196–211.